

REFORMULASI PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MODEL GBHN TANPA MEREPOSISI MPR¹

Oleh ; Dr.Mahmuzar,M.Hum²

Ditajak oleh MPR RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN/HAN) wilayah Riau tanggal 21 September 2016

A. Latar Belakang Masalah

- Pembangunan nasional yang dilakukan oleh Presiden yang memiliki masa jabatan terbatas (5 tahun), tidak konsisten dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Hal itu dapat terjadi karena setiap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu), memiliki visi, misi dan program kerja sendiri-sendiri, yang disampaikan kepada pemilih waktu kampanye pemilu, yang disebut sebagai janji-janji politik yang wajib dilaksanakan.
- Akibatnya, pelaksanaan pembangunan nasional tidak konsisten, tambal sulam, hanya mengikuti keinginan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berkuasa, sehingga sebagian pihak melihat model perencanaan pembangunan nasional pada masa Orde Lama dan Orde Baru lebih baik dari pada sekarang.
- Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, perencanaan dan keberhasilan pembangunan nasional diukur melalui garis-garis besar haluan negara yang disingkat dengan GBHN, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui **KETETAPAN MPR RI**.

¹ Disampaikan pada FGD kerjasama MPR RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN/HAN) wilayah Riau tanggal 21 September 2016

² Dosen HTN/HAN pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Email; Muzar244@gmail.com.

- Sekarang, semenjak MPR dengan suka rela memposisikan dirinya sederajat dengan Presiden, dan mengamputasi sebagian kewenangannya, MPR tidak lagi berwenang membuat dan menetapkan GBHN, sehingga keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak lagi diukur berdasarkan GBHN yang ditetapkan dengan ketetapan MPR, tetapi diukur melalui visi, misi dan program kerja sang Presiden dan Wakil Presiden.
- Sekarang berbagai pihak, di antaranya Muhammadiyah, Forum Rektor, Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Partai Golkar, Nasdem, PKS, dan lain-lain, menginginkan perencanaan pembangunan nasional kembali ke model GBHN seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar-belakang masalah di atas dirumuskan pertanyaan yang akan dijawab sebagai berikut;

1. Apakah MPR perlu diberikan kewenangan menetapkan GBHN sebagai acuan pelaksanaan pembangunan nasional?
2. Bagaimana implikasinya terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, jika MPR diberikan kewenangan menetapkan GBHN?

C. Pembahasan

- Demi konsistinsi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dipandang perlu ada cetak biru (*blue print*) yang

dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, yang pada masa Orde Lama dan Orde Baru disebut GBHN.

- MPR pada masa Orde Lama dan Orde Baru dapat menetapkan GBHN sebagai *blue print* pembangunan nasional karena diberi kewenangan oleh UUD 1945 yang kotruksi berpikirnya yakni;
- Ketentuan Pasal 1 ayat (2) 1945 lama menyebutkan; kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
- Karena MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka MPR diberi kewenangan untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden yang diangkat tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.
- Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUD 1945 lama, MPR diberi kewenangan untuk menetapkan UUD dan GBHN sebagai pedoman bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
- Setelah UUD 1945 diubah oleh MPR, Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang tadinya berbunyi; kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, berubah menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.
- Dengan kontuksi seperti itu, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan diberi kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu (Pasal 6a ayat (1), sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR.
- Selanjutnya, MPR yang tadinya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang dengan suka rela memposisikan dirinya menjadi lembaga negara yang

kedudukannya sejajar/sederajat dengan Presiden serta lembaga-lembaga negara yang lainnya, misalnya, DPR, MA, MK, BPK dan lain-lain.

- Oleh karena itu, banyak ahli berpendapat bahwa MPR berdasarkan kontruksi UUD 1945 baru tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan MPR (yang bersifat mengatur) termasuk ketetapan MPR tentang GBHN.
- Kontruksi berpikir seperti itu menyebabkan, jika MPR berkehendak ingin mereformulasi pembangunan nasional dengan model GBHN, mau tidak mau MPR harus mengamandemen UUD 1945, dan menempatkan kembali MPR pada posisi semula yakni sebagai lembaga tertinggi negara (supremasi MPR).
- Posisi MPR yang seperti itu (sebagai lembaga tertinggi negara) tentu tidak kita inginkan karena dalam situasi politik saat ini, dapat menyebabkan terjadinya oligarki di NKRI.
- Menurut penulis, jika MPR ingin menghidupkan kembali GBHN, MPR cukup mengamandemenkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menjadi “MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 serta GBHN.
- **Dasar pemikirannya,** pemberian kewenangan kepada MPR untuk menetapkan GBHN tidak mesti mereposisi MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti format UUD 1945 lama karena DPR yang bertugas membuat UU termasuk tentang lembaga kepresidenan, juga memiliki kedudukan sederajat dengan Presiden dan lembaga-lembaga negara yang lain. UU yang dibuat oleh DPR harus ditaati oleh Presiden dan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, walaupun kedudukannya sederajat dengan DPR.

- MPR saat ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945.
- UUD 1945 yang diubah dan ditetapkan oleh MPR tersebut, harus menjadi pedoman (mengatur) bagi semua rakyat Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sederajat dengan MPR.
- Artinya, MPR tidak berwenang membuat produk hukum yang bersifat mengatur (selain UUD) bukan disebabkan karena kedudukannya yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara yang lain, akan tetapi karena kewenangan untuk itu tidak diberikan oleh UUD 1945.
- Kontruksi UUD 1945 baru menganggap, MPR tidak perlu diberi kewenangan untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur kecuali UUD karena kewenangan untuk itu sudah diberikan kepada DPR dan Presiden serta DPD. Padahal jika diberikan oleh UUD tak masalah.
- Jika MPR diberi kewenangan menetapkan GBHN, timbul pertanyaan; bagaimana realitasnya dengan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat?
- Hal itu tidak masalah apabila calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mengumbar visi pada waktu kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak perlu membuat visi, karena NKRI sudah memiliki visi yang jelas sebagaimana termaktub dalam tujuan dibentuknya NKRI sebagaimana terdapat pada alenia keempat pembukaan UUD 1945.

- Calon Presiden dan calon Wakil Presiden cukup menjabarkan visi NKRI ke dalam misi dan program kerja dengan berpedoman kepada GBHN yang sudah ditetapkan oleh MPR sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung.
- **Bentuk Produk Hukum GBHN tersebut ada baiknya diatur dalam “Ketetapan MPR RI”** karena istilah ketetapan MPR sudah lazim dalam masyarakat Indonesia.
- Di samping itu, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketetapan MPR masih diakui keberadaannya, yakni pada urutan kedua setelah UUD 1945.
- Jika GBHN ditetapkan melalui Ketetapan MPR RI yang kedudukannya diakui di dalam struktur peraturan perundang-undangan, maka ia memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk Presiden dan Wakil Presiden harus mentaati dan melaksanakannya.
- Jika Presiden dan Wakil Presiden tidak melaksanakannya, berarti Presiden dan Wakil Presiden melanggar sumpah/janji yang diucapkannya, yakni tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) UUD 1945).
- Pelanggaran terhadap sumpah /janji jabatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikategorikan melakukan perbuatan tercela, sehingga dapat menjadi alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.
- Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan; Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa; pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau **perbuatan tercela** maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D. Penutup

Melakukan reformulasi pembangunan nasional dengan model GBHN sangat mungkin untuk dilakukan jika rakyat melalui MPR menghendaki demikian. Tidak terhalang oleh posisi MPR yang sederajat dengan Presiden dan dengan lembaga negara yang lain. Namun tentu dengan melakukan amandemen terbatas terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Produk hukum GBHN sebaiknya bernama Ketetapan MPR RI karena istilah ini sudah lazim dalam masyarakat Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat.